

**PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI
TERHADAP HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM DALAM
KAITANNYA DENGAN FIQIH KONTEMPORER**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.H.I) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

MUHAMAD GUFRAN

NIM. 10400108025

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2015

Penyusun,

MUHAMAD GUFRAN
NIM. 10400108025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhamad Gufran**, NIM: 10400108025, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim Dalam Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Darsul Puyu., M.Ag
NIP.19640417 199303 1 002

Prof. Dr. Usman, M.Ag
NIP. 19580901 199102 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim Dalam Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer”, yang disusun oleh Muhamad Gufran, NIM: 10400108025, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Senin 21 September 2015 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 21 September 2015

DEWAN PENGUJI:

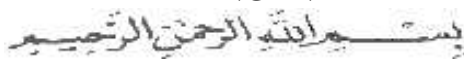
Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	()
Sekretaris	: Dr. Abdillah Mustari M.Ag	()
Munaqisy I	: Dr. Azman, M. Ag	()
Munaqisy II	: Irfan, S.Ag, M.Ag	()
Pembimbing I	: Dr. Darsul Puyu, M.Ag	()
Pembimbing II	: Prof. Dr. Usman, M. Ag	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kemampuan berfikir untuk berbuat kepada manusia, sehingga mampu melangsungkan taraf hidup dan membuat peradaban dunia di atas muka bumi serta mampu berpikir rasional, kritis, kreatif dan ulet dalam bertindak. Dengan segala teknologi mutakhir dalam pengabdian dan ibadah hanya kepada-Nya semata-mata. Shalawat dan taslim atas kehariban Rasulullah Saw. Atas akhlak mulia dan suritauladan yang dimiliki, menjadikannya sebagai panutan bagi ummat manusia sebagai *rahmatanlil-alam*. Nabi yang membawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat, yang merubah wajah dunia dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, dari alam sial menuju alam yang sosial. Kedatangannya juga membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (*jahiliyah*) dan perbudakan, lalu mencerahkannya dengan kecerdasan fikiran dan ketundukan bathin sehingga membuat manusia dan ummatnya taat, tetapi bukan ketaatan tanpa rasio dan kecerdasan, tetapi tidak membuatnya angkuh dan sombong.

Atas segala kerendahan hati, penulis menghadirkan karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi yang berminat pada tema kajian ini, yang berjudul “Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim Dalam Kaitannya Dengan Fiqih

Kontemporer” Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak pelajaran tentang makna hidup berdampingan dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk tetap melangkah menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak menjadi motivator tersendiri bagi penulis. Ucapan terima kasih Penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Asmad H. Ali dan Ibunda Hasina Hj. Siti Sia, yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayangnya tanpa adanya keluh kesah sedikit pun.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Musafir., M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dibanding dengan perguruan tinggi lain.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag, Selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Usman, M.Ag selaku Pembimbing II penulis, di tengah kesibukan beliau tetap menerima penulis untuk berkonsultasi.
5. Para Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan kepada penulis dalam proses penyelesaian studi;
6. Bapak Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Dr. Achmad Musyahid, S.Ag.,M.Ag.,

selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, serta staf jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, khususnya saudara Wawan Saputra SHI. Terima kasih banyak atas partisipasinya semoga langkah kita selalu diridhoi oleh sang Pencipta dan semoga kita dipertemukan kembali dilain waktu dan di lain tempat.
8. Pelita Hati, Kuswatul Hasanah yang telah memberi semangat dan membantu penulis baik berupa kasih sayang maupun moril dan materilnya demi penyelesaian Karya tulis ini.
9. Kepada semua pihak yang telah berjasa kepada Penulis yang hanya karena keterbatasan ruang hingga tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Jualah penulis memohon agar mereka yang telah berjasa kepada Penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, September 2015

Penulis

MUHAMAD GUFRAN

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan Penelitian	12
G. Sistemetika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF.....	18
A. Pengertian Wakaf	18
B. Dasar Hukum Wakaf	20
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26
D. Macam-Macam Wakaf.....	30
E. Sejarah Wakaf.....	32
F. Pengelolaan Wakaf	41
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG WAKAF BAGI NON MUSLIM	47

A. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Hanafi	47
B. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Maliki.....	58
C. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Wakaf Bagi Non Muslim	62
D. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Wakaf Bagi Non Muslim	65
BAB III ANALISIS TERHADAP LANDASAN HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM DAN KAITANNYA DENGAN FIQIH KOTEMPORER	69
A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang wakaf Bagi Non Muslim Serta Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer	70
B. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang wakaf Bagi Non Muslim Serta Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Nama : Muhamad Gufran
Nim : 10400108025
Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum / PMH
Judul : **Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Waqaf Bagi Non Muslim Dalam Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer**

Judul dari skripsi ini adalah “Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Waqaf Bagi Non Muslim Dalam Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer. Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah bagaimana hukum wakaf bagi non muslim menurut mazhab hanafi dan maliki serta bagaimana kaitannya anatar pandangan mazhab hanafi dan maliki bagi wakaf non muslim dengan fiqih kontemporer.

Adapun metode dalam penyusunan skripsi ini, adalah analisis normative yang berdasarkan pada Pendekatan yuridis, sosiologis dan pendekatan syar’i. Pendekatan yuridis, yaitu penulis berpedoman pada dalil-dalil nash al-qur’an dan hadist Nabi saw, Pendekatan sosiologis, Serta Pendekatan syar’i, Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah, penulis menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan jalan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

Hasil dari kajian ini adalah pemahaman tentang wakaf secara umum agar dapat mengetahui beberapa pandangan ulama mazhab tentang wakaf. Menurut bahasa adalah menjauhkan atau memenjarakan, sedangkn menurut istilah yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusaknya guna untuk kebaikan. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah wakaf yang dilakukan oleh non muslim untuk pembangunan masjid. Menurut imam hanafi bahwa wakaf bagi non muslim tidak sah apabila untuk kepentingan pembangunan masjid sebab sedekah atau wakaf untuk keperluan pembangunan masjid adalah taqarub dalam hukum islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Tetapi wakaf yang diperuntukkan untuk kegiatan social atau kegiatan ibadah secara umum dibolehkan. Sedangkan menurut Imam maliki bahwa wakaf bagi non muslim juga tidak dibolehkan atau tidak sah karena wakif bisa menjadi mauquf ‘alaih artinya seorang non muslim tidak bisa menjadi mauquf ‘alaih berarti non muslim juga tidak bisa menjadi wakif. Undang-undang wakaf sebenarnya tidak mencantumkan bahwa yang berhak menjadi wakif adalah orang muslim. Sedangkan menurut kajian fiqih kontemporer wakaf yang adalah sumbangsi social yang nyata dalam hal membantu manusia lain yang membutuhkan. Sebagai agama yang rahmatana lilalamin islam sangat memberikan ruang yang sangat besar bagi manusia yang ingin berbuat kebaikan (beramal saleh).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan Allah SWT dalam konteks zamannya dan dalam rangka memecahkan problema kemasyarakatan di kalangan umat islam. Allah SWT telah menjanjikan kepada umatnya yang beramal saleh dalam kehidupan di dunia akan mendapat balasan di akhirat dengan balasan yang lebih baik. Salah satu amal saleh dalam kehidupan social adalah Wakaf. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan waqaf adalah sebagai berikut :

Waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.¹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan menjelaskan bahwa :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Wakaf dalam perkembangannya adalah salah satu institusi atau pranata social Islam yang mengandung nilai-nilai social-ekonomi dan merupakan salah satu bentuk keagamaan, di samping sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang hidup dalam masyarakat berdasarkan tinjauan social. Demikian pula dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan

¹H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hal. 165.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 2.

Pemerintah, maka wakaf bisa pula dikatakan sebagai lembaga yang di atur oleh Negara.³

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan kebaikan, salah satunya adalah membantu orang-orang yang kurang mampu, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat yang sejahtera (welfare society). Anjuran untuk melakukan kebaikan sering disebut dalam al-Qur'an salah satunya terdapat pada surat an-Nahl ayat 97 di bawah ini :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁴

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan kehidupan yang lebih baik jika beramal saleh yang disertai dengan iman.

Ayat ini menjelaskan tentang adanya janji Allah SWT kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu berupa kehidupan yang baik di dunia dan akan dibalas di akhirat dengan lebih baik pula.

³Departemen Agama Republik Indonesia *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Sebagai Belahan Dunia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI 2013). h. 82

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Diponegoro. 2002), h. 75.

Sebagai sumber hukum islam, al-Qur'an memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Diantaranya ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah surat Al-Hajj (22) ayat 77, yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.⁵

Al-Qurtubi mengartikan “*berbuat baiklah kamu*” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan *sunnah* bukan perbuatan wajib sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya, salah satu perbuatan *sunnah* itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah SWT. Dalam Surat Ali Imran (3) ayat 92 Allah SWT berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

”kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Diponegoro. 2002), h. 85.

Para ulama berbeda pendapat tentang kata *ulbirra*, sebagian ulama mengartikan sebagai “pahala kebaikan” yang lain termasuk Ibn Katsir mengartikannya sebagai “surga”.⁶

Agama Islam adalah agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik (amal saleh) dengan berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam agama Islam.⁷

Berbicara mengenai agama, ada fenomena tentang wakaf beda agama yang juga disebut dengan wakaf non muslim. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah non muslim (kristen) mewakafkan tanahnya untuk kepentingan social, namun tanah tersebut telah dibangun Mushola.

Disini sepengetahuan penyusun, dalam agama non muslim (kristen) sendiri tidak ada yang disebut wakaf, namun dalam agama Kristen sendiri ada yang namanya Persembahan. Mengenai hal ini terdapat kontradiksi pendapat para ulama yang masing-masing konsisten pada pendapatnya sendiri.

Dalam buku *Sirah Nabawiyah*, Ibn Hisyam menuliskan kisah seorang Mukhairik yang beragama Yahudi yang telah menepati janjinya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Madinah diserang pada masa peperangan uhud. Mukhairik telah terbunuh bersama kaum muslimin yang mempertahankan kota Madinah. Ketika orang Mukhairik yang beragama Yahudi akan berangkat perang, ia berkata “jika saya mati dalam pertempuran, maka harta saya untuk

⁶Al-Imran al_jalil al_Afiz ‘Imaduddin Abi al-Fida Isma’il Ibn Katsir al-Quraishi al-Damssyiqi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*, 477. h. 381.

⁷Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2011) h. 175.

Muhammad dan untuk dimanfaatkan sesuai perintah Allah SWT”. Harta itu berupa tujuh areal perkebunan dan telah menjadi milik Nabi Muhammad. Lalu menyisihkan sebagian hasilnya untuk kebutuhan keluarganya selama satu tahun dan sisanya untuk membeli persenjataan dan untuk kepentingan kaum muslimin.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, tidak disebutkan bahwa orang yang berwakaf harus orang Muslim saja, namun mengenai wakaf non muslim ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dengan mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak sah, begitu juga mazhab Maliki mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak bisa di anggap sah.

Mengenai wakaf non muslim ada ada bebrapa ulama yang berbeda pendapat mengenai wakaf non muslim tersebut. Menurut pandangan mazhab Hanafi wakaf seorang muslim atau non muslim, sah hukumnya jika wakaf non muslim tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mazhab hanafi dari agama atau ras apapun. Selaras dengan itu, tindakan apapun yang bisa memberikan manfaat kemanusiaan, secara umum bisa dianggap sebagai wakaf yang sah dan tindakan seperti ini adalah sebuah tindakan universal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Sebab menyumbangkan harta pada tujuan seperti di atas adalah amal kebaikan dan taqarrub dalam hukum islam, baik dari seorang muslim ataupun dari non muslim.⁹

⁸Drs. H. Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar S, Ag. *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat)*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005). h. 31

⁹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Liman, 2004) hal. 296

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf untuk masjid atau sejenisnya, sah hukumnya jika berasal dari orang muslim saja. Sebab mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah taqarrub dalam hukum islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Bagi non muslim tindakan seperti itu tidak sah hukumnya, karena tindakan seperti itu tidak di niatkan taqarrub oleh mereka. Oleh karena itu, jika ada seorang non muslim (kristen) yang mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun masjid dan kaum muslimin shalat didalamnya selama bertahun-tahun maka dia berhak merobohkan masjid tersebut kapanpun dan menggunakan tanahnya sesuai keinginannya. Sebagaimana halnya, para ahli waris setelah kematian si wakif boleh membagikan tanah tersebut di antara mereka, seperti harta miliknya yang lain karena wakafnya itu tidak sah.¹⁰

Menurut pemikiran Mazhab Maliki, sah hukumnya wakaf dari seorang muslim kepada semua syiar Islam dan Badan-badan social umum. Mazhab Maliki juga menjelaskan tentang wakaf non muslim yang ditujukan ke masjid dan syiar-syiar Islam.¹¹ Disini Imam Maliki menjelaskan bahwa orang non muslim wakafnya di anggap tidak sah bila wakaf tersebut akan di bangun masjid.

Menurut Ibn Abidin, jika seorang non muslim tersebut menentukan bahwa penerima hasil wakaf hanyalah orang-orang miskin dari kalangan agamanya saja, maka wakaf itu hanya boleh diberikan kepada mereka saja dan tidak boleh diberikan kepada selain golongan mereka.¹²

¹⁰Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Liman, 2004) h. 296

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013). h. 21

¹²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Liman, 2004) h. 298

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap hukum wakaf bagi non muslim dalam kaitanya dengan dengan fiqih kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka, penyusun merumuskan permasalahan skripsi ini pada rumusan masalah yang akan di bahas. Ada beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus dan titik pembahasannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum Wakaf bagi non muslim menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki ?
2. Bagaimana kaitannya antara pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki bagi Wakaf non Muslim dengan Fiqih Kontemporer ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran arah penelitian ini dan menghindari kesalahan maka peneliti kemudian memberikan pengertian atau definisi operasional yang terkandung dalam judul dan permasalahan yang peneliti akan kaji dalam skripsi ini. Sebagaimana judul “Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim Dalam Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer”. Dari judul ini penulis

memberikan pengertian bahwa Wakaf berarti menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridlaan Allah SWT.

Dari pandangan beberapa ulama dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang sekaligus mampu mendorong peningkatan perekonomian ummat.

Ulama mazhab hanafi membolehkan wakaf non muslim apabila wakaf tersebut tidak untuk masjid, menurut mazhab hanafi bahwa wakaf untuk masjid sah hukumnya, jika berasal dari orang muslim saja. Sebab mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah taqarrub dalam hukum islam yang di khususkan bagi muslim saja. Bagi non muslim tindakan seperti itu tidak sah hukumnya, karena tindakan seperti itu tidak diniatkan taqarub oleh mereka dan wakafnya orang non muslim untuk pembangunan masjid tidak sah.

Menurut pemikiran mazhab maliki bahwa orang non muslim (Kristen) wakafnya tidak bisa di anggap sah apabila wakaf tersebut akan dibuakan masjid. Mazhab maliki juga menjelaskan tentang wakaf non muslim, di sini dijelaskan bahwa wakafnya seorang non muslim (Kristen) tidak sah hukumnya jika ditujukan ke masjid ataupun syiar-syiar islam lainnya.¹³

2. Ruang Lingkup Penelitian

¹³Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Liman, 2004) hal. 296

Agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus, maka pembahasan dan isi dari skripsi ini dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian sesuai dengan objek penelitian. Batasan ruang lingkup yang ingin dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penulis berfokus pada pandangan mazhab hanafi dan maliki terkait hukum wakaf bagi non muslim dan kaitannya dengan fiqh kontemporer.

D. Kajian Pustaka

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang mengupas seputar permasalahan tentang wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang membahas tentang wakaf non muslim yang dikaitkan dengan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki secara khusus, sejauh pengamatan penyusun, belum ditemukan yang membahas tentang wakaf non muslim secara terperinci.

Fiqh Wakaf, oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji) membahas Wakaf dalam islam, Syarat dan Rukun Wakaf, Wakaf dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia dan Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Ummat.

Dalam kitab *al-fiqh' ala al-mazahib al-khamsah* karya Muhammad Jawwad Mugniyyah, kitab tersebut memuat beberapa pendapat imam hanafi dan maliki tentang Wakaf bagi Non muslim.

Fiqh Lima Mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah, menggambarkan beragam pandangan Mazhab Tentang wakaf dan pembagiannya.

Hukum Wakaf dan Wakaf Produktif , Drs. Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. Buku ini membahas tentang Strategi pengelolaan Wakaf Produktif dan peran wakaf di Negara Muslim.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji) mengulas tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

Dr. Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Wakaf* membahas permasalahan wakaf dari segi teori baik dari tinjauan hukum islam maupun tinjauan hukum positif (PP No.28 Tahun 1977) dan peraturan pelaksanaannya.

Kompilasi Hukum Islam Abdurrahman, membahas tentang pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perwakafan.

Dengan berdasar pada buku-buku di atas, penulis akan mengembangkan pembahasan skripsi ini, baik secara metodologi maupun pembahasan yang berpegang pada literatur lainnya. Selain itu ada juga literatur-literatur skripsi yang berkaitan dengan judul ini misalnya persoalan wakaf masjid yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Adapun pendekatan analisis penyajian data yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis, dengan pendekatan secara normatif dimana akan di jabarkan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis normatif yang di dasarkan pada hasil analisis dengan melakukan penelitian terhadap data pustaka (library research) dan teori-teori yang terkait dengan pembahasan masalah atau disebut dengan kata skunder yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan data sesuai dengan objek penelitian kemudian menganalisa keberagaman pendapat para mazhab fikih islam, terutama mazhab Hanafi dan Maliki dalam memandang persoalan wakaf bagi non muslim berdasarkan pada pendekatan Syar'i dan pendekatan Yuridis.¹⁴

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Primer, melalui data primer penulis dapat melakukan sebuah kajian dari pandangan madzhab fiqih dalam bentuk buku yaitu: buku yang memuat pendapat imam Hanafi dan imam Maliki.

¹⁴Suratman, S.H., M.H dan H. Philips Dillah, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 171

- b. Data Skunder, melalui data skunder penulis dapat melakukan penelitian dari buku-buku literature yang berkenaan dengan masalah-masalah pendapat para ulama tentang wakaf baik dari kutipan langsung maupun dari kutipan tidak langsung.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun metode pengolahan dan Analisis data yang dimaksud yaitu penulis menggunakan tiga metode diantaranya sebagai berikut :

- a. Metode Induktif, yaitu suatu cara pengolahan data dengan jalan membahas hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan.
- b. Metode Deduktif, yaitu suatu cara pengolahan data dengan jalan membahas hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan.
- c. Metode Komparatif, yaitu cara pengolahan data dengan jalan membandingkan beberapa data atau pendapat kemudian menarik suatu kesimpulan yang logis.

F. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan diantaranya adalah:

1. Tujuan

Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak di capai antara lain :

- a. Menjelaskan wakaf non muslim menurut mazhab Hanafi dan Maliki

- b. Meliputi latar belakang pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang wakaf non muslim.
- c. Menjelaskan kaitan mazhab Hanafi dan Maliki tentang Wakaf non muslim dengan Fiqih Kontemporer.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga sebagai media latihan bagi penulis dalam menambah wawasan keilmuan sehingga penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi dilapangan.
- 2) Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan cakrawala, pemahaman dan pengalaman secara langsung di lapangan melalui penelitian tentang proses wakaf yang dilakukan oleh non muslim.

b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama mereka yang ingin mengetahui tentang bagaimana pandangan mazhab hanafi dan maliki terhadap hukum wakaf bagi non muslim dan kaitannya dengan fiqh kontemporer.
- 2) Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, referensi dan juga dapat menambah khasanah pengetahuan penulis pada

hususnya dan pembaca pada umumnya, serta meningkatkan pengetahuan agar penulis serta masyarakat dapat mengambil pelajaran yang berkaitan dengan syarat-syarat wakaf dan juga pengelolaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusun skripsi ini sistematis dan memudahkan dalam memahami, maka penyusun membagi pembahasan ke dalam beberapa bab dan sub-sub.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan

Bab II Gambaran Umum Tentang Wakaf

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, sejarah wakaf dan pengelolaan wakaf

Bab III Biografi Serta Pemikiran Mazhab Hanafi dan Maliki Tentang Wakaf Non Muslim

Dalam bab ini akan dipaparkan secara deskripsi tentang riwayat hidup dan pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap hukum wakaf bagi non muslim

Bab IV Analisis Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim dan Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer

Dalam bab ini akan dipaparkan secara normatif tentang hukum wakaf bagi non muslim dan kaitannya dengan fiqh kontemporer.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari bab-bab sebelumnya sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini. Sedangkan saran yaitu sesuatu yang akan menjadi masukan-masukan terhadap masyarakat maupun peneliti yang lain agar lebih menjawab semua kekurangan dari peneliti sebelumnya.



Kerangka Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
- D. Kajian Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Tujuan dan Kegunaan
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF

- A. Pengertian Wakaf
- B. Dasar Hukum Wakaf
- C. Rukun dan Syarat Wakaf
- D. Macam-Macam Wakaf
- E. Sejarah Wakaf
- F. Pengelolaan Wakaf

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI

TENTANG WAKAF BAGI NON MUSLIM

- A. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Hanafi
- B. Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Wakaf Bagi Non Muslim
- C. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Maliki
- D. Pemikiran Mazhab Maliki Tentang Wakaf Bagi Non Muslim

**BAB IV ANALISIS TERHADAP LANDASAN HUKUM WAKAF BAGI
NON MUSLIM DAN KAITANNYA DENGAN FIQIH
KONTEMPORER**

- A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Wakaf Bagi non Muslim serta Kaitannya
Dengan Fiqih Kontemporer
- B. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Wakaf Bagi non Muslim serta Kaitannya
Dengan Fiqih Kontemporer

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*al-Habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.¹⁵

Sedangkan definisi wakaf menurut istilah Syara’ adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan tentunya pemanfaatan tersebut harus digunakan untuk kebaikan.”¹⁶

Pada dasarnya definisi mengenai wakaf ada banyak perbedaan pendapat. Contohnya saja dikalangan para ahli fiqhi, seperti :

1. Imam Abu Hanifah.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum masih tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari si wakif, malah dia boleh menariknya kembali. Jika siwakif meninggal dunia, wakaf diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi efek dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya.

¹⁵H, Muammad Fadlullah dan B, Th, Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu* (Weltevreden: Balai Pustaka, Jilid I), h.116-117.

¹⁶H Adijani Al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan Praktik.*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), h.25

2. Imam Malik

Wakaf tetap menjadi milik wakif, tetapi si wakif tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kepemilikannya atas harta itu lepas, dan ia tidak boleh menari kembali wakafnya, serta ia wajib menyedekahkan manfaat benda wakaf tersebut.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk waktu tertentu, jadi tidak ada wakaf selamanya. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

3. Imam Syafi'i dan Imam Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh lagi melakukan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.¹⁷

Dari silang pendapat para ahli fiqih di atas, maka kita bisa menarik benang merah bahwa wakaf pada hakekatnya adalah pemberian seseorang (Wakif) kepada penerima untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf For Beginners; Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen, 2009), h.24

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Fiqih Islam *Wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili (2011: 273) mengatakan bahwa wakaf termasuk sedekah dan merupakan sunnah yang dianjurkan. Hukum sunnah ini diakui oleh mayoritas ulama selain Hanafiyyah.¹⁸ Dasar hukum disyariatkannya wakaf dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

a. Dalil dari Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menerangkan kepada masalah wakaf tersebut. Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu kepada hal tersebut. Ayat-ayat yang pada umumnya dapat dipahami dan digunakan para fuqoha sebagai dasar atau dalil yang mengacu kepada masalah wakaf tersebut, antara lain firman Allah:

a. Surat Al-Hajj : 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَرْكَعُوا وَاَسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya :

¹⁸Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2005.h. 11

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”¹⁹

b. Surat ‘Ali ‘Imron : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

c. Surat Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R
اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

¹⁹Departemen Agama Republik IndonesiaI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro. 2002), h. 236.

Ayat-ayat di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada wakaf, namun para fuqoha sepakat untuk menggunakannya sebagai dasar wakaf tersebut. Setidak-tidaknya mereka berpendapat bahwa wakaf itu tidak bertentangan dengan semangat ayat di atas. Kalau al-Qur'an menganjurkan agar manusia berbuat baik melalui sebagian dari hartanya, maka wakaf adalah salah satu realisasi anjuran al-Qur'an tersebut.

b. Dalil dari Al-Hadits

Disamping mengemukakan dasar hukum dari al-Qur'an, para fuqoha menyandarkan masalah wakaf ini kepada hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa hadits yang menyinggung tentang wakaf:

- a. Hadits Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Lafalnya menurut Muslim. Dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 366), sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar:

Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”(Muttafaq ‘Alaih). Susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya tidak di jual atau

b. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim

Dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 365), sebagai berikut:

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua.”²⁰

Para ulama menafsirkan “sedekah jariyah” yang disebutkan oleh hadits ini adalah wakaf.²¹ Sebab bentuk sedekah lain tidak menghasilkan pahala yang mengalir (jariyah) karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Kiranya wakaf lah yang menghasilkan pahala yang terus menerus mengalir selagi barang yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan.

²⁰ Ash-Shiddeiqy Hasbi, *Ahkam al-Fiqh al-Islami; Hukum Fiqih Islam*, (cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang) tt.

²¹ Acmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesjahteraan Umat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 57.

Kalau kita lihat dari beberapa dalil diatas, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang banyak.

Secara eksplisit, hukum wakaf itu menurut Az-Zuhaili sedikit ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah tetapi sebagian besar ditetapkan oleh ijihad upaya para mujtahidin menginterpretasikan al-Qur'an dan as-Sunnah para fuqoha dengan mendasarkan pada *istihsan*, *istishlah*, dan *'urf*.

Selanjutnya untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh mengenai dasar hukum wakaf, maka perlu kiranya mengemukakan pula dasar hukum menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Achmad Djunaidi, 2003: 21-31) yaitu:

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Masalah wakaf dapat diketahui pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 5, pasal 14 ayat (91), dan pasal 49.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas tujuh bab dan delapan belas pasal, mencakup pengertian wakaf, syarat-syarat sah wakaf, fungsi wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

3. Peraturan Menteri

- a. Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 mengatur tentang tata pendaftaran perwakafan tanah milik. Cakupannya meliputi persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran dan ketentuan peralihan.
 - b. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 [merinci lebih lanjut tata cara perwakafan tanah milik]. Pembahasannya tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan tanah milik.
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Inpres ini berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan KHI. Hukum perwakafan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.
- Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi obyek wakaf, sumpah nadzir, jumlah nadzir, perubahan benda wakaf, pengawasan nadzir, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir, dan peranan Majelis Ulama dan Camat.
5. Undang-Undang tentang Yayasan

Mengenai wakaf disinggung secara singkat dalam pasal 15 termuat dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001 LN Tahun 2001 Nomor 112.

6. SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Kedua peraturan diatas menyatakan bahwa secara umum Bank dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan pengelolaan dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit.²²

C. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut jumhur ulama dalam Fiqih Islam telah sepakat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)
3. Mauquf (harta yang diwakafkan)
4. Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).²³

²²Acmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesjahteraan Umat. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 79.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), h. 21

Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukkan Harta Benda Wakaf
6. Jangka Waktu Wakaf²⁴

Menurut hukum (fiqih) Islam, wakaf baru dikatakan sah apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu:

1. Tindakan/perbuatan yang menunjukkan pada wakaf.
2. Dengan ucapan, baik ucapan (ikrar) yang sharih (jelas) atau ucapan yang kinayah (sindiran). Ucapan yang sharih seperti: “*Saya wakafkan....*”. Sedangkan ucapan kinayah seperti: “*Saya shadaqahkan, dengan niat untuk wakaf*”.²⁵

Bagi orang yang berwakaf, disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukan secara sukarela, tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli, maa yang dimaksud dengan “ahli berbuat kebaikan” disini ialah orang yang berakal

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 4.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), h. 54.

sehat (tidak gila), tidak mubazir (karena harta orang mubazir dibawah walinya) dan balig.

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
2. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.
3. Bukan barang haram atau najis.²⁶

Sedangkan orang yang menerima benda wakaf berlaku beberapa ketentuan, antara lain :

Orang yang ahli memiliki syarat bagi orang yang berwakaf (wakif). Artinya ia berakal, balig dan tidak Mubazir. Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda itu diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada saat terjadi wakaf.

Karena itu tidak sah mewakafkan satu benda untuk anak yang belum lahir. Dan tidak sah wakaf kalau seseorang misalnya berkata : “saya wakafkan rumah ini”, karena tidak terang kepada siapa diwakafkannya.

Lafaz atau sigat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian

²⁶T.M Hasbi As-Siddiqi, *Hukum-Hukum Fiqhi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan Kelima, 1978. h. 18.

ulama berpendapat perlu ada Kabul (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja tidak perlu ada qabul.²⁷

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya adalah :

- a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak bisa. Tetapi jika mewakafkan tanah untuk dijadikan jalanan umum baik untuk orang kafir maupun orang muslim, itu sah-sah saja.
- b. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. Karena itu tidak sah apabila orang mengatakan: “saya mewakafkan kebun ini selama satu tahun”.
- c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah.

Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat memberi mudarat kepada ahli warisnya, maka wakafnya menjadi batal, karena Allah SWT tidak mengizinkan hal seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah dan menghasilkan sesuatu yang bellawanan dengan kewajiban-kewajiban dari Allah azza wa jalla, maka wakaf itu batal.

- d. Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah siwakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), h. 21.

Drs. H. Adijani Al-Alabij, SH. *Perwakafan Tanah Di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), h.

tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.²⁸

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya.

a. Wakaf berdasarkan tujuan

Wakaf berdasarkan tujuan ada tiga, yaitu:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum
2. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk member manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda.
3. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

b. Wakaf berdasarkan batasan waktunya

Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

²⁸Pimpinan pusat muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Dewan Tarjih Muhammadiyah, cetakan kedua, 1971), h.273

1. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganati kerusakannya.
 2. Wakaf Sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa member syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang member batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Wakaf berdasarkan penggunaannya

Wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti mesjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.
2. Wakaf Produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁹

²⁹Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), h. 68.

E. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.³⁰

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW."

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 21.

diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: “Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khataba disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian

pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.³¹

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 40.

terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan

ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut

berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.³²

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 43.

tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Kini ide mengenai wakaf dikenal luas dan dipraktikkan di mana-mana. Wakaf juga ditemukan di kalangan masyarakat Amerika Utara dengan nama yayasan, khususnya yayasan keagamaan dan amal. Di

Amerika Serikat saja, misalnya, terdapat puluhan ribu yayasan yang menjalankan fungsi sebagai lembaga wakaf. Namun, fungsi wakaf yang dijalankan oleh yayasan-yayasan ini hanya terbatas untuk tujuan keagamaan dan kedermawanan. Yayasan-yayasan di Amerika ini tidak mengenal wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga seseorang dan keturunannya, seperti halnya yang dikenal dalam masyarakat Islam.³³

Dalam buku *Sirah Nabawiyah*, Ibn Hisyam menuliskan kisah seorang Mukhairik yang beragama Yahudi yang telah menepati janjinya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Madinah diserang pada masa peperangan uhud. Mukhairik telah terbunuh bersama kaum muslimin yang mempertahankan kota Madinah. Ketika orang Mukhairik yang beragama Yahudi akan berangkat perang, ia berkata “jika saya mati dalam pertempuran, maka harta saya untuk Muhammad dan untuk dimanfaatkan sesuai perintah Allah SWT”. Harta itu berupa tujuh areal perkebunan dan telah menjadi milik Nabi Muhammad. Lalu menyisihkan sebagian hasilnya untuk kebutuhan keluarganya selama satu tahun dan sisanya untuk membeli persenjataan dan untuk kepentingan kaum muslimin.³⁴

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 89.

³⁴ Drs. H. Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar S, Ag. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005). h. 31.

F. Pengelolaan Wakaf

1. Pengelola Wakaf

Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola atau dalam fiqh disebut dengan *nadzir*. *Nadzir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun *nadzir* adalah isim fa'il dari kata *nadzir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan *nadzir wakaf* atau biasa disebut *nadzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.³⁵

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa *Nadzir* adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³⁶

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan *nadzir wakaf* hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki *wakif*.

³⁵Drs. H. Taufik Hamami, SH. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003), h. 98.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 6.

Kewajiban *nadzir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian *nadzir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

2. Badan Wakaf Indonesia

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi.³⁷

Kenyataannya dalam perkembangannya lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.³⁸

Untuk mengelola wakaf di Indonesia secara profesional, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang

³⁷Suhadi, H. Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (cet. Ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 28.

³⁸Achmad Djunaedi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 79.

mengkordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesia di berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayaan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Badan Wakaf Indonesia ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- e. Memberhentikan dan mengganti Nadzir
- f. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.³⁹

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 19.

Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:

- a. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
 - b. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
 - c. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.⁴⁰
3. Syarat Pengelolaan Wakaf

Agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan optimal maka ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola wakaf (nazhir) ataupun dalam pengelolaannya.

Dalam UU NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa syarat-syarat pengelola wakaf yaitu :

1. Nadzir Perseorangan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*. (Jakarta: Direktorat Binbaga Islam, 1992), h. 16.

- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁴¹

2. Organisasi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan :

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴²

3. Badan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴³

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 48.

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 50.

Dalam UU NO 41 Tahun 2004 disebutkan pula mengenai syarat-syarat pengelolaan wakaf yaitu:

- a. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.(Pasal 42)
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- d. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
- e. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.(Pasal 44).⁴⁴

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 53.

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 55.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI

TENTANG WAKAF BAGI NON MUSLIM

A. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Hanafi

1. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimiy, tapi ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ayahnya adalah keturunan bangsa Persia (Kabul / Afganistan) yang sudah menetap di Kufah, sehingga beliau pun dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H / 699 M dan wafat di Bagdad pada tahun 150 H / 767 M, yakni di masa akhir dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan raja bani Umayyah ke-5 dan masa awal dinasti Abbasiyah.⁴⁵

Ia diberi gelar Abu Hanifah karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (bapak / ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ada lagi satu riwayat yang mengatakan, ia bergelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Haniif yang berarti condong atau cenderung pada yang benar. Akan tetapi, menurut Yusuf Musa, ia

⁴⁵Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: bulan bintang, 1996), h. 79.

disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan "tinta" (dawat), dan kata Haniif menurut bahasa Arab berarti "tinta". Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-teman dan gurunya.

Awalnya Abu Hanifah gemar mempelajari ilmu qira'at, hadits, nahwu dan ilmu agama lainnya yang berkembang pada masa itu, bahkan ia pun mempelajari teologi (ilmu kalam), sehingga ia menjadi salah seorang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya ia sanggup untuk menangkis kaum khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Pada waktu itu kota Kufah merupakan pusat pertemuan ulama ilmu fiqh yang cenderung rasional, sehingga iapun menekuninya. Di kota ini terdapat madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H / 682 M). Kemudian berlanjut di bawah kepemimpinan Ibrahim al-Nakha'i lalu Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120). Dan dari Imam Hammad inilah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Imam Hammad sering mewakili kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberi fatwa. Kepercayaan ini diberikan karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqh.

Abu Hanifah adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan wawasan yang luas tentang ilmu agama, sehingga sangatlah tidak heran jika banyak kalangan yang memujinya dan mengakuinya. Hal ini

bisa dilihat dari Pernyataan dan pengakuan para ilmuwan lainnya. Imam Ibn al - Mubarak mengatakan: "aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdas dan pandai dari pada Imam Abu Hanifah." Imam Ali bin Ashimpun berkata: "jika sekitarnya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu terkalahkan ". Seorang raja, Harun kala itu juga menyatakan: "Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ia lihat dengan mata kepalanya". Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang: "pernahkah Anda melihat Abu Hanifah? Ya, saya melihatnya, ia adalah seorang laki-laki, jika Anda bertanya pada tiang ini supaya ia dijadikan emas, niscaya dia akan memberikan alasan-alasannya ". Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan: "manusia seluruhnya adalah keluarga dalam ilmu fiqh dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah". Pengakuan dan pernyataan yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i cukuplah membuktikan betapa luasnya pandangan dalam berkomentar hukum-hukum islam. Bahkan tidak hanya dalam masalah fikih, tentang haditspun beliau juga memiliki kepandaian dan kecerdasan. Menurut Imam Abu Yusuf sahabatnya Imam Syafi'i: "saya belum pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang hadits dan tafsirnya selain dari pada Abu Hanifah, ia tahu akan illat-illat hadits, mengerti tentang ta'dil dan tarjih, mengerti tentang tingkatan hadits yang sah atau tidak. Ia sendiri pernah berkata: "Jauhilah olehmu mengatakan urusan agama Allah menurut pendapatmu sendiri, tidak menurut hadits-hadits Nabi" Sehingga dalam perkembangan

selanjutnya ia lebih mengutamakan rasio (analogi/qiyas) dari pada hadits yang dipandang lemah ".⁴⁶

Dari sekian banyak riwayat yang menjelaskan tentang kealiman, kebesaran dan kemuliannya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi islam dan umatnya. Beliau juga seorang pilihan yang telah lulus dalam menempuh berbagai ujian berat, menderita dan sakit di dalam penjara sampai akhirnya beliau wafat tahun 150 H (576 M) pada usia 70 tahun dan dimakamkan di pekuburan khizra, dan pada saat itu lahirlah Imam Syafi'i.

Sepeninggal beliau, pada tahun 450 H / 1066 M didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama jami 'Abu Hanifah. Ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara meridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki 'bin jarah Ibn Hasan al-Syaibah dan lain-lain.⁴⁷

2. Karya – Karya Imam Abu Hanifah

Sepanjang hidupnya, Imam Abu Hanifah banyak mengajarkan berbagai ilmu kepada murid-muridnya, baik ilmu fiqh, ilmu kalam ataupun yang lainnya. Ini dikarenakan ia adalah seorang yang memiliki kepandaian dan kecerdasan yang luar biasa pada zamannya.

⁴⁶Mamoud Syaltout, Prof. Dr. Syaikh, *Perbandinagn Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1973), h. 56.

⁴⁷Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: bulan bintang, 1996), h. 82.

Diantara para ulama terkenal yang memnjadi sahabat beliau dan berjasa dalam pengkodifikasian fatwa-fatwa beliau adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Anshary (113-182 h)
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H)
- c. Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H)
- d. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H).

Pada saat beliau masih hidup, fatwa-fatwa dan hasil ijtihad beliau belum dikodifikasikan, setelah beliau meninggal, barulah buah pikirannya itu dikodifikasikan oleh murid-murid dan para sahabatnya sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang. Sebagian dari para muridnya, pada masalah hukum keagamaan ada yang melanggar, ada yang berlawanan dan ada pula yang berbeda pendapat atas gagasan beliau, tetapi sebagian besar mereka itu telah menyepakati dan sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh beliau.⁴⁸

Dalam melakukan pengkodifikasian kata-kata dan buah pikiran Imam Abu Hanifah tentang masalah-masalah hukum agama, para sahabat beliau mencampurnya dengan kata-kata atau pendapat mereka masing-masing dengan pendapat Imam Hanafi. Karena aliran beliau itulah yang

⁴⁸ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (cet. Ke-22, Jakarta: Lentera, 2008), h. 78.

asli, sehingga hal-hal yang melanggar dengan pendapat atau berlawanan dengan kata beliau adalah sedikit sekali.

Dari keempat sahabat dan murid beliau yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan "al-Kutub al - Sittah "(enam kitab) yaitu:

1. Kitab al – Mabsuth
2. Kitab al-Ziyadat
3. Kitab al-Jami ‘al-Shaghiir
4. Kitab al-Jami ‘al-Kabir
5. Kitab al-Sair ‘al-Shaghir
6. Kitab al-Sair ‘al-Kabir⁴⁹

Kitab al - Mabsuth adalah kitab terpanjang yang dihimpun dan diurutkan oleh Imam Muhammad ibn Hasan, yang di dalamnya berisi ribuan masalah keagamaan yang dipegang atau ditetapkan oleh Imam Hanafi. Di dalamnya juga berisikan tentang perselisihan pendapat antara Imam Hanafi Imam Ibnu Abi Laila.

Kitab al-Jami 'al - Shaghir, kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan dari Imam Isa ibn Abban dan Imam Muhammad ibn Sima'ah, keduanya adalah murid Imam Muhammad ibn Hasan. Kitab ini berisi 40

⁴⁹ Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: bulan bintang, 1996), h. 85.

pasal dari pasal-pasal fiqh yang awalnya adalah pasal "Ash-Shalah". Tetapi dalam kitab ini tidak diberi bab-bab fasalnya, Oleh karena itu, dikemudian hari disusun dan diatur perbab oleh al-Qadhi Abuth-Thahir, Muhammad ibn Muhammad ad-Dabbas untuk memudahkan bagi yang ingin mempelajarinya.

Kitab al-Jami 'al-Kabir berisikan sebagaimana kitab yang kedua, hanya saja lebih panjang uraiannya. Kitab al-sair al-Shagir yang berisikan masalah - masalah jihad semata. Sedang al-sair al-Kabir berisikan masalah-masalah fiqh juga.

Sepanjang riwayat bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang yang mula-mula merencanakan ilmu fiqh, mengatur dan menyusunnya dengan Dibab-bab sepasal demi sepasal untuk memudahkan orang yang mempelajarinya. Karena di masa para sahabat dan tabi'in fiqh itu belumlah dihimpun dan diurutkan. Ia mengkhawatirkan akan hilangnya ilmu pengetahuan itu, sehingga beliau merencanakan, mengatur dan menyusun menjadi beberapa kitab dan bab. Sehingga tidaklah mengherankan jika Imam Syafi'I mengatakan "bahwa para ahli fiqh itu menjadi anak asuh dari Imam Abu Hanifah".

4. Metode Istimbat yang digunakan Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah ulama yang terkenal menggunakan rasio dalam ijtihaad-ijtihaad, sehingga ia dikenal dengan ahl al-ra'yu. Ia hidup

selama 52 tahun pada masa dinasti umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa hidupnya, ia sempat menyaksikan tragedi - tragedi besar di Kufah. Di satu sisi Kufah memberikan makna dalam kehidupannya sehingga menjadi seorang ulama besar al-Imam al-A'zam. Tapi disisi lain, beliau merasakan kota Kufah sebagai kota yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Kufah dan Bashra di Irak memang melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang seperti ilmu sastra, teologi, tafsir, hadits dan tasawuf, intelektualitas Abu Hanifah diwarnai oleh kedua kota bersejarah tersebut.

Di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertarungan tradisional antara suku Arab utara, Arab selatan dan Persi. Oleh karena itu, pola pikir Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan dan pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahl al-ra'yu (anggota rasional) dalam menetapkan hukum islam, baik yang dinisbatkan dari al-Qur'an maupun al-Hadts. Ia banyak menggunakan nalar, mengutamakan ra'yu dari pada kabar ahad. Bila ada hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan qiyas dan Istihsan.

Beliau mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ada dalam al-Qur'an dan sunnah, dan menganjurkan pembahasan persoalan dengan bebas merdeka. Ia banyak

mengandalkan qiyas (analogi), Istihsan dan istishab dalam menetapkan hukum. Cara ini menjadi cirri umum mazhabnya, sehingga ia sering disebut sebagai "ahl al-ra'yu". Salah satu alasan mengapa Abu Hanifah banyak menggunakan akal dalam menentukan hukum adalah kurangnya hadits yang tersebar di Irak kala itu, kondisi yang menuntut beliau untuk banyak berpikir dalam menentukan hukum. Tentang cara ia mengatur hukum dari suatu permasalahan diungkapkannya sendiri sebagai berikut: "Saya mengambil hukum dari al-Qur'an, jika saya tidak mendapatkannya dari al-Qur'an, maka saya bersandar kepada sabda-sabda rosul yang shohih dan yang ada dikalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Bila dalam al-Qur'an dan Hadits tidak saya temukan sesuatu, maka saya beralih ke keterangan para sahabat. Saya mengambil mana yang saya inginkan dan meninggalkan mana yang saya inginkan. Setelah berpijak pada pendapat para sahabat, saya menengok pada pendapat orang-orang lain. Jika telah sampai pada pendapat Ibrahim al-Syuba'i, Hasan Basri, Ibnu Sirin, Sa'ad bin Musayyab - sambil beliau mengajukan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka akupun berhak melakukan ijihad sebagaimana yang mereka lakukan. Sahal bin Muzahim pernah menyatakan : "pendapat Abu Hanifah berpegang pada apa yang dipercaya, menjauhkan dari keburukun, suka memperhatikan adat istiadat dan hal ikhwal orang banyak, apa yang dianggap baik dan buruk oleh mereka. Imam Hanafi memecahkan berbagai problematika dengan jalan qiyas, ketika jalan itu terasa kurang tepat, maka ia menempuh jalan Istihsan selama jalan ini

dapat ditempuh. Jika metode inipun tidak dapat ditempuh, maka ia mengembalikan urusan itu kepada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin.⁵⁰

Secara hierarkis pokok-pokok pikiran mazhab Hanafi adalah:

- a. Al-Kitab (al-Qur'anul Karim), adalah pilar utama syari'at, semua hukum kembali kepadanya dan ini sumber dari segala sumber hukum.
- b. Al-sunnah Rasulullah SAW dan atsar-atsar yang shahih dan telah masyhur (tersiar) diantara para ulama yang ahli, dan merupakan penjelasan dari al- Qur'an dan perinci dari yang mujmal (global). Siapa yang tidak mau berpegang pada al Sunnah tersebut, berarti ia tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang disampaikan melalui RosulNya.
- c. Al-Aqwal al-Sahabah (fatwa-fatwa dari para sahabat), pendapat atau ucapan-ucapan dari para sahabat di mana mereka menyaksikan masa turunnya al-Qur'an serta mengetahui kompatibilitas antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadits serta pewaris ilmu dari Nabi SAW untuk generasi berikutnya.
- d. Al-Qiyas, apabila ternyata dalam suatu permasalahan tidak ditemukan dasar hukumnya, baik itu dalam al-Qur'an, al-Sunnah

⁵⁰Muhammad, Teungku Hasbi As-Siddiq, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizky Puta. tt)

maupun perkataan sahabat, maka beliau menggunakan al-Qiyas, yaitu menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama diantara keduanya.

- e. Al-Istihsan, keluar atau menyimpang dari keharusan logika analogi (qiyas) yang tanpa nyata menuju ke hukum lain yang menyalahinya. Sebenarnya al-Istihsan merupakan pengembangan dari al-Qiyas, dan petunjuk al-ra'yu lebih menonjol lagi. Menurut bahasa Al-Istihsan berarti "menganggap baik" atau "menemukan yang baik". Sedang menurut istilah ulama Ushul fiqh adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang pada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.
- f. 'Urf (adat istiadat) masyarakat muslim yang terjadi dalam suatu masa tertentu yang tidak ada dalam nash al-Qur'an, sunnah atau belum ada praktek sahabat. Pendirian beliau adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercaya dan lari dari keburukan serta memperhatikan mu'amalah- mu'amalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Ia melakukan segala urusan (bila tidak ditentukan dalam al-Qur'an, al-Sunnah al-Ijma' atau al-Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara al-

Qiyas), ia melakukan dengan al-Istihsan. Bila tidak dapat dilakukan al-Istihsan, beliau kembali pada 'urf manusia.⁵¹

Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah yang terletak jauh dari Madinah yang notabene sebagai kota solusi problem-problem yang muncul dalam masyarakat. Sedang di Kufah, hadits hanya sedikit yang diketahui, disamping banyak terjadi pemalsuan hadits sehingga Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah yang aktual, ia banyak menggunakan al-Rayyu. Ia mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang baru, yang belum ada dalam al-Qur'an dan sunnah, dan menganjurkan pembahasan persoalan dengan bebas merdeka, ia banyak mengandalkan qiyas (analogi) dan juga berdasarkan Istihsan dalam menentukan hukum.⁵²

B. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Maliki

1. Riwayat Hidup Imam Maliki

Imam Maliki bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari

⁵¹Muhammad, Teungku Hasbi As-Siddiq, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizky Puta, tt

⁵²Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: bulan bintang, 1996), h. 93.

keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.⁵³

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq.

Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, mazhab ini juga dikenal amat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah Alquran, sunah Rasulullah SAW, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli Madinah), qiyas (analogi), dan *al-*

⁵³Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: bulan bintang, 1996), h. 34.

masalah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab resmi di Makkah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Maroko, dan Sudan. Kecuali di tiga negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut Mazhab Maliki kini menyusut.

Mayoritas penduduk Makkah dan Madinah saat ini mengikuti Mazhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut Mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Maroko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut Mazhab Maliki.

2. Karya-karya Imam Malik

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Malik kemudian menuliskannya. Dalam Muwattha', Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil "tradisi orang-orang Madinah" sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Ia juga mengambil hadis munqathi' dan mursal sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu.

Kitab-kitab madzhab Maliki, antara lain :

1. Al Muwattho'

2. Al Mudawwanah
 3. Al Wadhihah
 4. Al Mustakhrijah Al 'Atbiyah 'ala al Muwaththo'
 5. Al Muwaziyah
 6. Mukhtashor Kholil
 7. At Ta'riifaat
 8. Al Bayan wa at Takhshil
 9. Ad Dakhiro, karya Syihabuddin Ahmad bin Idris (684 H)
 10. Majmu' al Fiqhi fii Maddzhab Imam Malik
 11. Jaami'ul Ummahaat⁵⁴
5. Metode Istimbat yang digunakan Mazhab Maliki

Secara lebih jelas dasar-dasar yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah

Berbeda dengan Abu Hanifah yang mensyaratkan dengan kualifikasi tertentu, Imam Malik meski mengutamakan hadis mutawatir dan masyhur, juga menerima hadis ahad asalkan tidak bertentangan dengan amal (praktik) ahli Madinah.

⁵⁴Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: bulan bintang, 1996), h. 52.

3. Amal ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah) Imam Malik berpendapat bahwa Madinah merupakan tempat Rasulullah menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah mesti diperbolehkan, atau bahkan dianjurkan oleh Nabi Saw. Oleh karena itu, Imam Malik beranggapan bahwa praktik masyarakat Madinah merupakan bentuk as-Sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan.
4. Fatwa Sahabat
5. Qiyas
6. Al-Mashlahah Mursalah

Yakni menetapkan hukum atas berbagai persoalan yang tidak ada petunjuk nyata dalam nash, dengan pertimbangan kemaslahatan, yang proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar mujtahidnya.

Penganut mazhab Maliki ini sampai sekarang banyak pengikutnya dan mereka tersebar di negara-negara, antara lain: Mesir, Sudan, Kuwait, Bahrain, Maroko dan Afrika.⁵⁵

C. Pandangan Mazhab Hanafi Terhadap Wakaf Bagi Non Muslim

Agama Islam meletakkan masalah perwakafan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, hukum Islam mempunyai ruang

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h.122.

lingkup yang menyeluruh dan meliputi segala aspek kehidupan manusia serta memiliki nilai-nilai akidah, ibadah, dan muamalah.⁵⁶

Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep 'ubudiah dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, salah satu di antaranya adalah muamalah. Karena itu, Islam sebagai salah satu ajaran atau agama tidak hanya meniti beratkan pada aqidah semata, tetapi tidak kalah pentingnya wakaf dalam muamalah.

Wakaf merupakan salah satu ruang lingkup yang menjadi salah satu tuntunan ajaran islam yang menyangkut ibadah ijma'iyah (ibadah sosial). karena wakaf bagian dari ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari rida-Nya. Namun dalam al-Qur'an wakaf tidak dijelaskan secara langsung. jadi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai wakaf, salah satunya wakaf non muslim.

Fenomena yang terjadi dilapangan adalah seorang non muslim (Kristen) mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum. Abu Hanifah berpendapat bahwa Wakaf non muslim tidak bisa dianggap sah jika mewakafkan tanahnya untuk persoalan sosial keummatan dalam islam.

Alasan Imam Abu Hanifah tidak sahnya wakaf non muslim yang terjadi, apabila wakaf tersebut dibangun sebuah masjid dan sejenisnya. Karena menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah perbuatan ibadah jadi menurut

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*. (Jakarta: Direktorat Binbaga Islam, 1992), h. 20.

Imam Abu Hanifah wakaf non muslim hanya sah, jika wakaf non muslim tersebut hanya diperuntukan sebagai kepentingan umum saja. Adapun tentang wakaf non muslim, mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak sah, jika wakaf tersebut dibangun sebuah masjid, karena menurut mazhab ini mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah, tindakan sedekah adalah taqarub dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja.

Berarti wakaf non muslim yang diperuntukan selain kegiatan ibadah atau untuk kemaslahatan manusia secara umum dibolehkan.

Menurut pandangan mazhab Hanafi wakaf seorang muslim atau non muslim, sah hukumnya jika wakaf non muslim tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mazhab hanafi dari agama atau ras apapun.

Selaras dengan itu, tindakan apapun yang bisa memberikan mafaat kemanusiaan, secara umum bisa dianggap sebagai wakaf yang sah dan tindakan seperti ini adalah sebuah tindakan universal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Sebab menyumbangkan harta pada tujuan seperti di atas adalah amal kebaikan dan taqarrub dalam hukum islam, baik dari seorang muslim ataupun dari non muslim.⁵⁷

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf untuk masjid atau sejenisnya, sah hukumnya jika berasal dari orang muslim saja. Bagi non muslim tindakan seperti itu tidak sah hukumnya, karena tindakan seperti itu tidak di niatkan taqarrub oleh mereka. Oleh karena itu, jika ada seorang non

⁵⁷Drs. H. Taufik Hamami, SH. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*.(Jakarta: PT.Tata Nusa, 2003), h. 211.

muslim (kristen) yang mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun masjid dan kaum muslimin shalat didalamnya selama bertahun-tahun maka dia berhak merobohkan masjid tersebut kapanpun dan menggunakan tanahnya sesuai keinginannya. Sebagaimana halnya, para ahli waris setelah kematian si wakif boleh membagikan tanah tersebut di antara mereka, seperti harta miliknya yang lain karena wakafnya itu tidak sah.⁵⁸

Dalam memutuskan hukum tersebut Imam Abu Hanifah tidak pernah mendahulukan qiyas selama masih ada nas. Hukum qiyas dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, apabila keadaan sudah memaksa. Imam Abu Hanifah mengambil qiyas, apa bila tidak bertentangan dengan urf yang ada di masyarakat atau kemaslahatan manusia, bila qiyas itu tidak dapat dilakukan karena berlawanan, maka Abu Hanifah akan meninggalkan qiyas dan mengambil Istihsan.

D. Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Wakaf Bagi Non Muslim

Agama Islam adalah agama yang selalu memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik (amal saleh) dengan berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam agama islam.⁵⁹

⁵⁸ Mamoud Syaltout, Prof. Dr. Syaikh, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1973), h. 126.

⁵⁹Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), h.118.

Islam juga adalah *Rahmatan lil alamin* yaitu agama yang selalu memberikan kenyamanan bagi manusia dimuka bumi ini untuk beramal dan beribadah tanpa memandang ras, golongan maupun etnis serta agama.

Berbicara mengenai agama, ada fenomena tentang wakaf beda agama yang juga disebut dengan wakaf non muslim. Fenomena yang terjadi antara non muslim (kristen) mewakafkan tanahnya untuk kepentingan social, namun tanah tersebut telah dibangun Mushola.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, tidak disebutkan bahwa orang yang berwakaf harus orang Muslim saja. Mazhab Maliki mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak bisa di anggap sah.⁶⁰

Menegenai wakaf non muslim Menurut pemikiran Mazhab Maliki, sah hukumnya wakaf dari seorang muslim kepada semua aktifitas ibadah umat Islam dan Badan-badan social umum. Mazhab Maliki juga menjelaskan tentang wakaf non muslim jika ditujukan ke masjid dan syiar-syiar Islam maka wakaf tersebut tidak sah hukumnya.⁶¹

Disini Imam Maliki menjelaskan bahwa orang non muslim wakafnya tidak di anggap sah bila wakaf tersebut akan di bangun masjid.

Menurut Ibn Abidin, jika seorang non muslim tersebut menentukan bahwa penerima hasil wakaf hanyalah orang-orang miskin dari kalangan

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 5.

⁶¹Mughniya, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (cet. Ke-22, Jakarta: Lentera, 2008), h. 225.

agamanya saja, maka wakaf itu hanya boleh diberikan kepada mereka saja dan tidak boleh diberikan kepada selain golongan mereka.⁶²

Mazhab Maliki mensyaratkan agar wakif bisa menjadi mauquf 'alaih, karena menurut mazhab Maliki orang non muslim yang tidak berhak menjadi mauquf 'alaih, maka orang non muslim juga tidak berhak menjadi wakif. Dengan tegas mazhab Maliki mengatakan bahwa wakaf sah hukumnya untuk semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum bila wakaf tersebut hanya berasal dari seorang muslim saja, Berarti wakaf non muslim menurut mazhab Maliki tidak sah hukumnya apabila wakaf tersebut dipergunakan sebagai pembangunan masjid.

Metode yang digunakan mazhab Maliki dalam menetapkan hukum adalah suatu hal yang tidak bisa terlepas dengan dasar hukum yang digunakan oleh pendirinya yaitu Imam Malik. al-Qur'an digunakan sebagai sumber hukum Islam yang utama, karena menurut mazhab Maliki al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir dan al-Qur'an dipandang sebagai *qat'i as-Subut* (riwayatnya diterima secara pasti dan meyakinkan), as-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang digunakan oleh Imam Malik setelah al-Qur'an, lalu 'amal ahli Madinah merupakan hujjah yang didahulukan atas qiyas dan khabar Ahad, dan qiyas yang berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian yang ada nassnya. Imam Malik sangat berhati-hati dalam menerima hadis rasulullah SAW.

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf For Beginners, Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009), h. 113.

Dari pandangan mazhab Hanafi dan Maliki dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa wakaf non muslim tidak sah, apabila wakaf non muslim tersebut ditujukan untuk Masjid dan ditujukan untuk syi'ar-syi'ar Islam.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP LANDASAN HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM DAN KAITANNYA DENGAN FIQIH KONTEMPORER

Dengan adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar Negara-negara yang dihuni mayoritas umat islam mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan social umat islam, baik yang menyangkut ideologi politik, sosial, budaya dan sebagainya.

Berbagai perobahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan tatanan dan tatacara hidup umat di dunia yang melahirkan banyak simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan atau disebabkan kemajuan modernisasi yang tidak diimbangi dengan pembaharuan pemikiran keagamaan.⁶³

Telah mapannya sistem pemikiran barat (hukum positif) di mayoritas negeri muslim secara faktual lebih mudah diterima dan diamalkan apa lagi sangat didukung oleh kekuatan yang bersifat structural maupun kultural, namun masyarakat islam dalam penerimaan konsepsi barat tersebut tetap merasakan adanya semacam “kejanggalan” baik secara psikologis, sosiologis maupun politis. Tetapi karena belum terwujudnya konsepsi islam yang lebih kontekstual, maka dengan rasa ketidakberdayaan mereka mengikuti saja konsepsi yang tidak islami.

⁶³Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan & Pemikiran*, (Jakarta: Mizan, 2000), h. 34.

Hal tersebut akhirnya menggugah naluri pakar hukum islam yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Wakaf Bagi non Muslim serta Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer

Dalam pandangan mazhab Hanafi terhadap wakaf non muslim yang menyimpulkan bahwa wakaf non muslim tidak bisa dianggap sah jika mewakafkan tanahnya untuk persoalan sosial keummatan dalam islam.

Alasan Imam Abu Hanifah tidak sahnya wakaf non muslim yang terjadi, apabila wakaf tersebut dibangun sebuah masjid dan sejenisnya. Karena menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah perbuatan ibadah jadi menurut Imam Abu Hanifah wakaf non muslim hanya sah, jika wakaf non muslim tersebut hanya diperuntukan sebagai kepentingan umum saja. Adapun tentang wakaf non muslim, mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak sah, jika wakaf tersebut dibangun sebuah masjid, karena menurut mazhab ini mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah, tindakan sedekah adalah taqarub dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja⁶⁴.

Berarti wakaf non muslim yang diperuntukan selain kegiatan ibadah atau untuk kemaslahatan manusia secara umum dibolehkan.

⁶⁴Muhammad abid Al-Kabisi, Abdullah, *Hukum Wakaf*. (Terjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: Dompot Duafa Republika dan Imam, 2004). h. 128.

Menurut pandangan mazhab Hanafi wakaf seorang muslim atau non muslim, sah hukumnya jika wakaf non muslim tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mazhab hanafi dari agama atau ras apapun.

Al-Qaradh w menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai syariat penutup sebagai petunjuk bagi manusia. Allah SWT. telah menciptakan ciri khasnya berupa nilai-nilai general, abadi sekaligus universal (*syum l*). Di samping itu Allah SWT. juga menjadikannya bersifat terbuka dan tidak kaku. Dalam hal itulah terdapat kesempatan bagi para ulama untuk berijtihad terhadap permasalahan yang tidak ada dalilnya secara *qath'i*. Meskipun demikian, al-Qaradh w tetap menggariskan bahwa ijtihad harus tetap berorientasi pada mencari keridhaan Allah, tanpa melanggar batas (ekstrim), dan bukan untuk mengabaikan hak-hak manusiawi.⁶⁵

Selaras dengan itu, tindakan apapun yang bisa memberikan mafaat kemanusiaan, secara umum bisa dianggap sebagai wakaf yang sah dan tindakan seperti ini adalah sebuah tindakan universal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Sebab menyumbangkan harta pada tujuan seperti di atas adalah amal kebaikan dan taqarrub dalam hukum islam, baik dari seorang muslim ataupun dari non muslim.⁶⁶

⁶⁵Y suf al-Qaradh w , *Al-Ijtih d f al-Syar 'ah al-Isl miyyah ma'a Nazhar t Tahl liyyah f al-Ijtih d al-Mu' shir*. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996), h. 5.

⁶⁶http://www.ensikperadaban.com/?TOKOH_%26amp%3B_INTELEKTUAL_MUSLIM_KONTEMPORER. Akses 22 Agustus 2015.

B. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Wakaf Bagi non Muslim serta Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer

Mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demikian juga saling membantu dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah sangat dianjurkan agama kita dan begitu agama lain. Rasulullah dalam sebuah riwayat pernah menyisihkan sebagian sedekah untuk diberikan kepada Ahli Kitab. Ini merupakan tauladan dari beliau bahwa tolong menolong untuk mewujudkan kemaslahatan umum adalah tugas semua pemeluk agama.⁶⁷

Agama Islam meletakkan masalah perwakafan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, hukum Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh dan meliputi segala aspek kehidupan manusia serta memiliki nilai-nilai akidah, ibadah, dan muamalah.

Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep 'ubudiah dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, salah satu di antaranya adalah muamalah. Karena itu, Islam sebagai salah satu ajaran atau agama tidak hanya meniti beratkan pada

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*. (Jakarta: Direktorat Binbaga Islam, 1992), h. 56.

aqidah semata, tetapi tidak kalah pentingnya wakaf dalam muamalah yang telah diisyaratkan dalam agama islam.⁶⁸

Sebagai agama yang *Rahmatan lil alamin* islam selalu memberikan kenyamanan bagi manusia dimuka bumi ini untuk beramal dan beribadah tanpa memandang ras, golongan maupun etnis serta agama.⁶⁹

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, tidak disebutkan bahwa orang yang berwakaf harus orang Muslim saja. Mazhab Maliki mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak bisa di anggap sah.⁷⁰

Menegenai wakaf non muslim Menurut pemikiran Mazhab Maliki, sah hukumnya wakaf dari seorang muslim kepada semua aktifitas ibadah umat Islam dan Badan-badan social umum. Mazhab Maliki juga menjelaskan tentang wakaf non muslim jika ditujukan ke masjid dan syiar-syiar Islam maka wakaf tersebut tidak sah hukumnya.⁷¹

Disini Imam Maliki menjelaskan bahwa orang non muslim wakafnya tidak di anggap sah bila wakaf tersebut akan di bangun masjid.⁷²

⁶⁸Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesjahteraan Umat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 41.

⁶⁹Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan & Pemikiran*. (Jakarta: Mizan, 2000), h.7.

⁷⁰Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), h. 75.

⁷¹Mamoud Syaltout, Prof. Dr. Syaikh, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1973), h. 62.

⁷²[http://www.IndonesiaIndonesia.com/f/6814nonmuslimmewakafkan tanah/orangnonmuslim ingin berwakaf](http://www.IndonesiaIndonesia.com/f/6814nonmuslimmewakafkan_tanah/orangnonmuslim_ingin_berwakaf). Akses 26 Agustus 2015

Dalam islam, wakaf adalah salah satu bentuk sumbangsih terhadap masyarakat yang mempunyai efek membentuk dan membina akhlak dan juga sekaligus untuk tujuan-tujuan lain yang mulia. Dengan perkembangan saat ini wakaf dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk membuktikan bahwa manusia manapun berhak memberi bantuan kepada manusia lainnya dengan asas bahwa barang (sesuatu benda bergerak maupun tak bergerak) itu jelas dan tidak menimbulkan asas mudharatnya baik bagi si wakif maupun bagi si penerima (pribadi maupun kelompok atau agama).⁷³



⁷³http://www.ensikperadaban.com/?TOKOH_%26amp%3B_INTELEKTUAL_MUSLIM_KONTEMPORER. Akses 22 Agustus 2015

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang penulis susun pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf bagi non muslim hukumnya tidak sah menurut Imam Abu Hanifah.

Alasan imam abu hanafi tidak sahnya wakaf non muslim yang terjadi, apabila wakaf tersebut di bangun sebuah masjid dan sejenisnya, karena menurut imam abu hanafi wakaf adalah perbuatan ibadah, jadi menurut imam abu hanafi wakaf non muslim hanya sah, jika wakaf non muslim tersebut hanya di peruntukan sebagai kepentingan umum saja. Adapun tentang wakaf non muslim, mazhab hanafi mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak sah, jika wakaf tersebut di bangun sebuah masjid. Menurut mazhab ini mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah. Tindakan sedekah taqarub dalam hukum islam di khususkan bagi muslim saja. Berarti wakaf non muslim yang di peruntukan selain kegiatan ibadah atau untuk kemaslahatan manusia secara umum di bolehkan.

Dalam memutuskan hukum tersebut imam abu hanafi tidak pernah mendahulukan qiyas selama masih ada nas. Hukum qiyas di lakukan imam abu hanafi, apabila keadaan sudah memaksa. Imam abu hanafi mengambil qiyas, apabila tidak bertentangan dengan urf yang ada di

masyarakat atau kemaslahatan manusia, bila qiyas itu tidak dapat dilakukan karena berlawanan, maka abu hanafi akan meninggalkan qiyas dan mengambil istihsan.

2. Wakaf bagi non muslim tidak sah menurut Imam Maliki. Mazhab Maliki mensyaratkan agar wakif bisa menjadi maukuf 'alaih, karena menurut mazhab maliki orang non muslim tidak berhak menjadi mauquf'alaih, maka orang non muslim juga tidak berhak menjadi wakif. Dengan tegas mazhab maliki mengatakan bahwa wakaf sah hukum nya untuk semua syiar-syiar islam dan badan-badan sosial umum bila wakaf tersebut hanya berasal dari seorang muslim saja, berarti wakaf non muslim menurut mazhab maliki tidak sah hukumnya apabila wakaf tersebut di pergunakan sebagai pembangunan masjid. Metode yang di gunakan mazhab maliki dalam menetapkan hukum adalah suatu hal yang tidak bisa terlepas dengan dasar hukum yang di gunakan oleh pendirinya yaitu imam malik. Al-quran di gunakan sebagai sumber hukum islam yang utama, karena menurut mazhab maliki al-aquran di riwayatkan secara mutawattir dan al-quran di pandang sebagi qat'is as-subut [riwayatnya di terima secara pasti dan meyakinkan], as-sunah merupakan sumber hukum islam yang kedua di gunakan imam malik setelah al-quran, lalu' amal ahli madinah merupakan hujjah yang di dahulukan atas qiyas dan khabar ahad, dan qiyas yang berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak nas kepada kejadian yang ada nassnya. Dari pandangan mazhab hanafi dan maliki dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa wakaf non muslim tidak sah, apabila wakaf

non muslim tersebut di tujukan untuk masjid dan di tujukan untuk syiar islam.

3. Dalam pandangan Fiqih kontemporer Wakaf bagi non muslim itu hukumnya sah-sah saja asalkan jelas asal usul benda wakaf tersebut. Dalam islam, wakaf adalah salah satu bentuk sumbangsi terhadap masyarakat yang mempunyai efek membentuk dan membina akhlak dan juga sekaligus untuk tujuan-tujuan lain yang mulia. Dengan perkembangan saat ini wakaf dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk membuktikan bahwa manusia manapun berhak memberi bantuan kepada manusia lainnya dengan asas bahwa barang (sesuatu benda bergerak maupun tak bergerak) itu jelas dan tidak menimbulkan asas mudharatnya baik bagi si wakif maupun bagi si penerima. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, tidak disebutkan bahwa orang yang berwakaf harus orang Muslim saja.

B. SARAN

Agar hasil kajian ini tidak hanya untuk menjadi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana maka ada beberapa saran kepada masyarakat pada umumnya dan pada peneliti khususnya agar lebih melihat aspek kemaslahatan umat dalam hal memberikan wakaf dan menerima wakaf. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Apa yang dilakukan oleh imam abu hanafi dan maliki merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya. Dalam pengambilan hukum dari kedua imam tersebut, maka terlebih dahulu mempelajari keduanya, mempertemukannya dan mengambil mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat karena tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Oleh karena itu mengambil pendapat keduanya haruslah melihat sisi baiknya baik bagi diri sendiri maupun bagi kelompok atau orang banyak. Yang paling penting dari semua unsur itu adalah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
2. Penelitian ini adalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan seputar masalah wakaf khususnya dalam masalah hukum islam (fiqih). Karena keterbatasan kemampuan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut. Akhirnya Wallahu A'lamu bi as-Sawab wa alhamdulillahilahi rabbi' al-amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Drs. H. Adijani, *Perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddeiqy Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqhi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan Kelima, 1978.
- Al-Imran Al_Jalil Al_Afiz 'Imaduddin Abi al-Fida Isma'il Ibn Katsir al-Quraishi al-Damssyiqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, 477.
- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Liman, 2004.
- Ash-Shiddeiqy Hasbi, *Ahkam al-Fiqh al-Islami; Hukum Fiqih Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang tt.
- Al-Syarbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan Ahmad, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro. 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf For Beginners, (Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf)*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.
- Departemen Agama, *Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)*. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djunaidi, Drs. H. Achmad dan Al-Asyhar S, Ag, Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat)*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Husna, Ahmad, *Hukum Islam Tidak Mengenal Reaktualisasi*, cet. Ke-1, Solo: Perpustakaan Mantiqi, 1989.
- Hamami, Drs. H. Taufik SH. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Suratman, S.H., M.H dan H. Philips Dillah, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Khalil,. Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: bulan bintang, 1996.
- Mamoud Syaltout, Prof. Dr. Syaikh, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang. 1973.
- Mardani, Dr, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. cet. Ke-1, Jakarta : PT.Refika Aditama, 2011.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, cet. Ke-2, Bandung: PT Rosdakarya.
- Mughniya, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. Ke-22, Jakarta: Lentera, 2008.

Muhammad, Teungku Hasbi As-Siddiq, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizky Puta, 1991.

Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan & Pemikiran*, Jakarta: Mizan, 2000.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Dewan Tarjih Muhammadiyah, cetakan kedua, 1971.

Suhadi, H. Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002.

Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Syar'ah al-Islamiyyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1996.

[http://www.ensikperadaban.com/?TOKOH %26amp%3B INTELEKTUAL MUSLI
M KONTEMPORER](http://www.ensikperadaban.com/?TOKOH%26amp%3B%20INTELEKTUAL%20MUSLIM%20KONTEMPORER). Akses 22 Agustus 2015.

[http://www.IndonesiaIndonesia.com/f/6814nonmuslimmewakafkan
tanah/orangnonmuslim ingin berwakaf](http://www.IndonesiaIndonesia.com/f/6814nonmuslimmewakafkan-tanah/orangnonmuslim-ingin-berwakaf). Akses 26 Agustus 2015.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhamad Gufran, Lahir di Mata Air Reok, Manggarai, Flores-Nusa Tenggara Timur pada tanggal 21 Juli 1990 dari Pasangan Suami Istri, Asmad H. Ali dan Hasina Hj. Siti Sia Puasa. Merupakan Anak ke enam dari Sembilan bersaudara yang hidup dari keluarga sederhana.

PENDIDIKAN :

- 1. Sekolah Dasar Negeri Reo II Pada tahun 1996 – 2002**
- 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Reok Tahun 2002 – 2005**
- 3. Madrasah Aliyah Negeri Reok Tahun 2005 -2008**
- 4. Universitas Islam Negeri (UIN) Alaluddin Makassar 2008 – 2015**

PENGALAMAN ORGANISASI :

- 1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Muslim Manggarai (IM3) Makassar 2009**
- 2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum 2010**
- 3. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum 2011**
- 4. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muslim Manggarai (IM3) Makassar 2010**
- 5. Sekertaris Umum Komunitas Mahasiswa Analisis (KOMA) 2010**
- 6. Dewan Pertimbangan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muslim Manggarai (IM3) Makassar 2011**
- 7. Dewan Pembina Ikatan Mahasiswa Muslim Manggarai (IM3) Makassar 2015-2016**
- 8. Koordinator Lingkar Kajian Pemuda Daerah (LKPD) Makassar 2015-2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhamad Gufran**, NIM: 10400108025, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim Dalam Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Darsul Puyu., M.Ag
NIP.19640417 199303 1 002

Prof. Dr. Usman, M.Ag
NIP. 19580901 199102 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR KOMPREHENSIF



DAFTAR NILAI MUNAQASYAH

